

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum dan Praktek*, CV Jakad Media Publishing, Jakarta, 2020.

Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

A. Anshari Ritonga, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*, Pustaka Elmanar, Jakarta, 2017.

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019.

Fidel, *Tindak Pidana Perpajakan & Amandemen Undang-Undang: KUP, PPH, PPN, Pengadilan Pajak*, PT. Carofin Media, Cetakan I, Jakarta, 2015.

Hadi Irmawan, *Pengantar Perpajakan*, Bayu Media, Malang, 2003.

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009.

Madiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2001.

Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.

Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Jakarta, 2013

Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Nuryadi Mulyodiwarno, *Catatan Tentang Beberapa Hak dan Kewajiban Perpajakan*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Nuryadi Mulyodiwarno, *Menakar Kesetaraan Hak dan Kewajiban Perpajakan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Nuryadi Mulyodiwarno, *Reformasi Menuju Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Perpajakan*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Nuryadi Mulyodiwarno, *Catatan Tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-undang Perpajakan Berdasarkan UU KUP, UU PPH dan UU PPN*, Rajawali Pers, Depok, 2021.

P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Perubahan ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, 2014.

Putri A.R. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011.

R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

R Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1977

Soekanto, Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1982

Sugiyono, *Metode Penelitian Administratif*, Alfabeta, Bandung: 2001.

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.

Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing & Ayyccs Group, Bandung, 2006.

Triwibowo-Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006.

Jurnal, Karya Ilmiah:

Ruben Achmad, *Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Jurnal Studi tentang Pelembagaan Undang-Undang Perkawinan 1974, 1988

Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan-Bappenas, 2012.

Ghazi Leomuwafig, *Pertanggung Jawaban Notaris Ppat Dalam Melakukan Pelayanan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)*, Jurnal Media Hukum Dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya.

Tesis:

Anggrainy, Tuti, “Akibat Hukum Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana DiBidang Perpajakan Dalam Menjalankan Jabatannya”, *Tesis*, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2020.

Lumbanbatu, Agustina Lusiana Elisabet, “Analisis Hukum Atas Perbuatan Oknum Notaris Yang Menerima Penitipan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)”, *Tesis*, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2011.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 157/Pid.Sus/2019/PN Cbi.

Media Internet:

Tiga Notaris Divonis 3 Tahun Bui karena Tilep Pajak Rp. 5 Miliar, melalui <https://metro tempo.co/tiga-notaris-divonis-3-tahun-bui-karena-tilep-pajak-rp-5-miliar>.

<http://www.seputarilmu.com/2019/11/pengertian-teori-menurut-para-ahli.html>, Diakses 29 April 2022 jam 13.00 WIB.

<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>
Diakses 29 April 2022 Pukul 14.20 WIB.

<https://heylawedu.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman> Diakses Tanggal 29 April 2022 Jam 15.00 WIB.

<http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Rekam-Jejak-Pemikiran-Hukum-Progresif-Prof-Satjipto-Rahardjo-by-Suteki.pdf>, Diunduh Pada Hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 Pukul 15.50 WIB.

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/20/175331569/4-indikator-kesadaran-hukum-warga-negara>, Diunduh Pada Hari Selasa tanggal 7 Juni 2020, Pukul 19.03 WIB.

http://www.academia.edu/8838989/Indonesia_sebagai_negara_hukum_INDONESIA_S_EBAGAI_NEGARA_HUKUM Diunduh Pada Hari Sabtu Tanggal 2 April 2022 Pukul 14.11 WIB.

Perundang-Undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan:

Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan , dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya Nomor 34 tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak:

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-21/PJ/2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: 11/PJ/2016 tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-40/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-21/PJ/2019 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2019 tentang Perubahan Kedua Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-21/PJ/2019 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya